



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 /KM.7/2020

TENTANG

PENUNDAAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
DAN/ATAU DANA BAGI HASIL TERHADAP PEMERINTAH DAERAH YANG TIDAK
MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 772/KMK.01/2017 tentang Mandat Menteri Keuangan kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 910/KMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 772/KMK.01/2017 tentang Mandat Menteri Keuangan kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2977/SJ tentang Pertimbangan Penundaan DAU dan/atau DBH tanggal 23 April 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL TERHADAP PEMERINTAH DAERAH YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
- PERTAMA : Melakukan pengenaan sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil bagi Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 secara lengkap dan benar dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran COVID-19 di daerah.
- KEDUA : Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari besarnya penyaluran Dana Alokasi Umum setiap bulan dan/atau Dana Bagi Hasil setiap triwulan mulai bulan Mei 2020 dan/atau mulai triwulan II pada tahun anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 secara lengkap dan benar kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan serta dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran COVID-19 di daerah, sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dinyatakan dicabut dan dilakukan penyaluran kembali sebesar Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang ditunda penyalurannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA** : Penyaluran kembali Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada periode penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil berikutnya.
- KEENAM** : Penyaluran kembali Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum.
- KETUJUH** : Dalam hal sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun anggaran 2020 berakhir Laporan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT belum disampaikan, total besaran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang ditunda tidak dapat disalurkan kembali kepada Pemerintah Daerah bersangkutan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Gubernur bersangkutan;
3. Bupati/Wali Kota bersangkutan;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerjasama Antar Lembaga

DIAH SARKORINI
NIP 19630114 198803 2 001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 /KM.7/2020
TENTANG
PENUNDAAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
DAN/ATAU DANA BAGI HASIL TERHADAP PEMERINTAH
DAERAH YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN
PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PENUNDAAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
DAN/ATAU DANA BAGI HASIL TERHADAP PEMERINTAH DAERAH YANG TIDAK
MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Kab. Aceh Barat	DAU	35,00%
2.	Kab. Aceh Besar	DAU	35,00%
3.	Kab. Aceh Selatan	DAU	35,00%
4.	Kab. Aceh Tengah	DAU	35,00%
5.	Kab. Aceh Tenggara	DAU	35,00%
6.	Kab. Aceh Timur	DAU	35,00%
7.	Kab. Aceh Utara	DAU	35,00%
8.	Kab. Bireuen	DAU	35,00%
9.	Kab. Pidie	DAU	35,00%
10.	Kab. Simeulue	DAU	35,00%
11.	Kota Banda Aceh	DAU	35,00%
12.	Kota Langsa	DAU	35,00%
13.	Kota Lhokseumawe	DAU	35,00%
14.	Kab. Gayo Lues	DAU	35,00%
15.	Kab. Aceh Barat Daya	DAU	35,00%
16.	Kab. Aceh Jaya	DAU	35,00%
17.	Kab. Nagan Raya	DAU	35,00%
18.	Kab. Aceh Tamiang	DAU	35,00%
19.	Kab. Bener Meriah	DAU	35,00%
20.	Kab. Pidie Jaya	DAU	35,00%
21.	Kota Subulussalam	DAU	35,00%
22.	Prov. Sumatera Utara	DAU	35,00%
23.	Kab. Asahan	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
24.	Kab. Dairi	DAU	35,00%
25.	Kab. Deli Serdang	DAU	35,00%
26.	Kab. Karo	DAU	35,00%
27.	Kab. Labuhanbatu	DAU	35,00%
28.	Kab. Langkat	DAU	35,00%
29.	Kab. Mandailing Natal	DAU	35,00%
30.	Kab. Nias	DAU	35,00%
31.	Kab. Simalungun	DAU	35,00%
32.	Kab. Tapanuli Selatan	DAU	35,00%
33.	Kab. Tapanuli Tengah	DAU	35,00%
34.	Kota Pematang Siantar	DAU	35,00%
35.	Kota Sibolga	DAU	35,00%
36.	Kota Tebing Tinggi	DAU	35,00%
37.	Kota Padang Sidempuan	DAU	35,00%
38.	Kab. Pakpak Bharat	DAU	35,00%
39.	Kab. Nias Selatan	DAU	35,00%
40.	Kab. Serdang Bedagai	DAU	35,00%
41.	Kab. Batu Bara	DAU	35,00%
42.	Kab. Padang Lawas	DAU	35,00%
43.	Kab. Padang Lawas Utara	DAU	35,00%
44.	Kab. Labuhanbatu Selatan	DAU	35,00%
45.	Kab. Labuhanbatu Utara	DAU	35,00%
46.	Kab. Nias Utara	DAU	35,00%
47.	Prov. Sumatera Barat	DAU	35,00%
48.	Kab. Limapuluh Kota	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
49.	Kab. Padang Pariaman	DAU	35,00%
50.	Kab. Pasaman	DAU	35,00%
51.	Kab. Pesisir Selatan	DAU	35,00%
52.	Kab. Sijunjung	DAU	35,00%
53.	Kab. Solok	DAU	35,00%
54.	Kab. Tanah Datar	DAU	35,00%
55.	Kota Padang Panjang	DAU	35,00%
56.	Kota Sawahlunto	DAU	35,00%
57.	Kota Pariaman	DAU	35,00%
58.	Prov. Riau	DAU	35,00%
59.	Kab. Bengkalis	DAU	35,00%
60.	Kab. Indragiri Hilir	DAU	35,00%
61.	Kab. Indragiri Hulu	DAU	35,00%
62.	Kab. Kampar	DAU	35,00%
63.	Kab. Kuantan Singingi	DAU	35,00%
64.	Kab. Pelalawan	DAU	35,00%
65.	Kab. Rokan Hilir	DAU	35,00%
66.	Kab. Rokan Hulu	DAU	35,00%
67.	Kab. Siak	DAU	35,00%
68.	Kota Dumai	DAU	35,00%
69.	Kota Pekanbaru	DAU	35,00%
70.	Kab. Kepulauan Meranti	DAU	35,00%
71.	Prov. Jambi	DAU	35,00%
72.	Kab. Bungo	DAU	35,00%
73.	Kab. Merangin	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
74.	Kab. Muaro Jambi	DAU	35,00%
75.	Kab. Sarolangun	DAU	35,00%
76.	Kab. Tanjung Jabung Barat	DAU	35,00%
77.	Kab. Tanjung Jabung Timur	DAU	35,00%
78.	Kab. Tebo	DAU	35,00%
79.	Kota Jambi	DAU	35,00%
80.	Prov. Sumatera Selatan	DAU	35,00%
81.	Kab. Musi Banyuasin	DAU	35,00%
82.	Kab. Musi Rawas	DAU	35,00%
83.	Kab. Muara Enim	DAU	35,00%
84.	Kab. Ogan Komering Ilir	DAU	35,00%
85.	Kab. Ogan Komering Ulu	DAU	35,00%
86.	Kota Prabumulih	DAU	35,00%
87.	Kota Lubuk Linggau	DAU	35,00%
88.	Kab. Banyuasin	DAU	35,00%
89.	Kab. Ogan Ilir	DAU	35,00%
90.	Kab. OKU Selatan	DAU	35,00%
91.	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	DAU	35,00%
92.	Kab. Musi Rawas Utara	DAU	35,00%
93.	Kab. Bengkulu Selatan	DAU	35,00%
94.	Kab. Bengkulu Utara	DAU	35,00%
95.	Kab. Rejang Lebong	DAU	35,00%
96.	Kota Bengkulu	DAU	35,00%
97.	Kab. Kaur	DAU	35,00%
98.	Kab. Seluma	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
99.	Kab. Mukomuko	DAU	35,00%
100.	Kab. Lebong	DAU	35,00%
101.	Kab. Kepahiang	DAU	35,00%
102.	Kab. Bengkulu Tengah	DAU	35,00%
103.	Prov. Lampung	DAU	35,00%
104.	Kab. Lampung Barat	DAU	35,00%
105.	Kab. Lampung Selatan	DAU	35,00%
106.	Kab. Lampung Tengah	DAU	35,00%
107.	Kab. Lampung Timur	DAU	35,00%
108.	Kab. Tanggamus	DAU	35,00%
109.	Kab. Tulang Bawang	DAU	35,00%
110.	Kota Bandar Lampung	DAU	35,00%
111.	Kota Metro	DAU	35,00%
112.	Kab. Pringsewu	DAU	35,00%
113.	Prov. Jawa Barat	DAU	35,00%
114.	Kab. Bekasi	DAU	35,00%
115.	Kab. Bogor	DAU	35,00%
116.	Kab. Ciamis	DAU	35,00%
117.	Kab. Cianjur	DAU	35,00%
118.	Kab. Cirebon	DAU	35,00%
119.	Kab. Garut	DAU	35,00%
120.	Kab. Indramayu	DAU	35,00%
121.	Kab. Karawang	DAU	35,00%
122.	Kab. Kuningan	DAU	35,00%
123.	Kab. Majalengka	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
124.	Kab. Purwakarta	DAU	35,00%
125.	Kab. Sukabumi	DAU	35,00%
126.	Kab. Sumedang	DAU	35,00%
127.	Kab. Tasikmalaya	DAU	35,00%
128.	Kota Bogor	DAU	35,00%
129.	Kota Cirebon	DAU	35,00%
130.	Kota Sukabumi	DAU	35,00%
131.	Kota Tasikmalaya	DAU	35,00%
132.	Kota Cimahi	DAU	35,00%
133.	Prov. Jawa Tengah	DAU	35,00%
134.	Kab. Banjarnegara	DAU	35,00%
135.	Kab. Batang	DAU	35,00%
136.	Kab. Blora	DAU	35,00%
137.	Kab. Brebes	DAU	35,00%
138.	Kab. Cilacap	DAU	35,00%
139.	Kab. Demak	DAU	35,00%
140.	Kab. Grobogan	DAU	35,00%
141.	Kab. Karanganyar	DAU	35,00%
142.	Kab. Kebumen	DAU	35,00%
143.	Kab. Kendal	DAU	35,00%
144.	Kab. Klaten	DAU	35,00%
145.	Kab. Kudus	DAU	35,00%
146.	Kab. Magelang	DAU	35,00%
147.	Kab. Pati	DAU	35,00%
148.	Kab. Pemasang	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
149.	Kab. Purbalingga	DAU	35,00%
150.	Kab. Sragen	DAU	35,00%
151.	Kab. Sukoharjo	DAU	35,00%
152.	Kab. Tegal	DAU	35,00%
153.	Kab. Temanggung	DAU	35,00%
154.	Kab. Wonogiri	DAU	35,00%
155.	Kab. Wonosobo	DAU	35,00%
156.	Kota Magelang	DAU	35,00%
157.	Kota Pekalongan	DAU	35,00%
158.	Kota Salatiga	DAU	35,00%
159.	Kota Surakarta	DAU	35,00%
160.	Prov. DI Yogyakarta	DAU	35,00%
161.	Kab. Bantul	DAU	35,00%
162.	Kab. Gunung Kidul	DAU	35,00%
163.	Kab. Kulon Progo	DAU	35,00%
164.	Kab. Bangkalan	DAU	35,00%
165.	Kab. Blitar	DAU	35,00%
166.	Kab. Bojonegoro	DAU	35,00%
167.	Kab. Bondowoso	DAU	35,00%
168.	Kab. Gresik	DAU	35,00%
169.	Kab. Jember	DAU	35,00%
170.	Kab. Jombang	DAU	35,00%
171.	Kab. Kediri	DAU	35,00%
172.	Kab. Lamongan	DAU	35,00%
173.	Kab. Lumajang	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
174.	Kab. Madiun	DAU	35,00%
175.	Kab. Malang	DAU	35,00%
176.	Kab. Mojokerto	DAU	35,00%
177.	Kab. Nganjuk	DAU	35,00%
178.	Kab. Ngawi	DAU	35,00%
179.	Kab. Pacitan	DAU	35,00%
180.	Kab. Pasuruan	DAU	35,00%
181.	Kab. Probolinggo	DAU	35,00%
182.	Kab. Sampang	DAU	35,00%
183.	Kab. Sidoarjo	DAU	35,00%
184.	Kab. Situbondo	DAU	35,00%
185.	Kab. Tuban	DAU	35,00%
186.	Kota Kediri	DAU	35,00%
187.	Kota Madiun	DAU	35,00%
188.	Kota Mojokerto	DAU	35,00%
189.	Kota Pasuruan	DAU	35,00%
190.	Kota Probolinggo	DAU	35,00%
191.	Prov. Kalimantan Barat	DAU	35,00%
192.	Kab. Bengkayang	DAU	35,00%
193.	Kab. Landak	DAU	35,00%
194.	Kab. Kapuas Hulu	DAU	35,00%
195.	Kab. Mempawah	DAU	35,00%
196.	Kab. Sambas	DAU	35,00%
197.	Kab. Sanggau	DAU	35,00%
198.	Kab. Sintang	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
199.	Kota Pontianak	DAU	35,00%
200.	Kota Singkawang	DAU	35,00%
201.	Kab. Melawi	DAU	35,00%
202.	Kab. Kayong Utara	DAU	35,00%
203.	Kab. Kubu Raya	DAU	35,00%
204.	Prov. Kalimantan Tengah	DAU	35,00%
205.	Kab. Kapuas	DAU	35,00%
206.	Kab. Kotawaringin Barat	DAU	35,00%
207.	Kab. Kotawaringin Timur	DAU	35,00%
208.	Kab. Lamandau	DAU	35,00%
209.	Kab. Pulang Pisau	DAU	35,00%
210.	Kab. Barito Timur	DAU	35,00%
211.	Prov. Kalimantan Selatan	DAU	35,00%
212.	Kab. Hulu Sungai Tengah	DAU	35,00%
213.	Kab. Hulu Sungai Utara	DAU	35,00%
214.	Kab. Kotabaru	DAU	35,00%
215.	Kab. Tabalong	DAU	35,00%
216.	Kab. Tapin	DAU	35,00%
217.	Kab. Balangan	DAU	35,00%
218.	Kab. Tanah Bumbu	DAU	35,00%
219.	Kab. Kutai Kartanegara	DAU	35,00%
220.	Kab. Paser	DAU	35,00%
221.	Kab. Penajam Paser Utara	DAU	35,00%
222.	Kab. Mahakam Ulu	DAU	35,00%
223.	Prov. Sulawesi Utara	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
224.	Kab. Bolaang Mongondow	DAU	35,00%
225.	Kota Manado	DAU	35,00%
226.	Kab. Minahasa Selatan	DAU	35,00%
227.	Kab. Minahasa Utara	DAU	35,00%
228.	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	DAU	35,00%
229.	Kota Kotamobagu	DAU	35,00%
230.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	DAU	35,00%
231.	Kab. Minahasa Tenggara	DAU	35,00%
232.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	DAU	35,00%
233.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	DAU	35,00%
234.	Prov. Sulawesi Tengah	DAU	35,00%
235.	Kab. Banggai	DAU	35,00%
236.	Kab. Banggai Kepulauan	DAU	35,00%
237.	Kab. Buol	DAU	35,00%
238.	Kab. Toli-Toli	DAU	35,00%
239.	Kab. Morowali	DAU	35,00%
240.	Kota Palu	DAU	35,00%
241.	Kab. Parigi Moutong	DAU	35,00%
242.	Kab. Tojo Una Una	DAU	35,00%
243.	Kab. Morowali Utara	DAU	35,00%
244.	Kab. Barru	DAU	35,00%
245.	Kab. Bone	DAU	35,00%
246.	Kab. Bulukumba	DAU	35,00%
247.	Kab. Enrekang	DAU	35,00%
248.	Kab. Gowa	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
249.	Kab. Jeneponto	DAU	35,00%
250.	Kab. Luwu	DAU	35,00%
251.	Kab. Luwu Utara	DAU	35,00%
252.	Kab. Pangkajene Kepulauan	DAU	35,00%
253.	Kota Palopo	DAU	35,00%
254.	Kab. Luwu Timur	DAU	35,00%
255.	Kab. Pinrang	DAU	35,00%
256.	Kab. Sinjai	DAU	35,00%
257.	Kab. Kepulauan Selayar	DAU	35,00%
258.	Kab. Sidenreng Rappang	DAU	35,00%
259.	Kab. Soppeng	DAU	35,00%
260.	Kab. Takalar	DAU	35,00%
261.	Kab. Wajo	DAU	35,00%
262.	Kota Pare-pare	DAU	35,00%
263.	Kota Makassar	DAU	35,00%
264.	Kab. Konawe	DAU	35,00%
265.	Kab. Muna	DAU	35,00%
266.	Kota Kendari	DAU	35,00%
267.	Kota Bau-bau	DAU	35,00%
268.	Kab. Bombana	DAU	35,00%
269.	Kab. Wakatobi	DAU	35,00%
270.	Kab. Konawe Utara	DAU	35,00%
271.	Kab. Buton Utara	DAU	35,00%
272.	Kab. Konawe Kepulauan	DAU	35,00%
273.	Kab. Kolaka Timur	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
274.	Kab. Muna Barat	DAU	35,00%
275.	Kab. Bangli	DAU	35,00%
276.	Kab. Klungkung	DAU	35,00%
277.	Kab. Bima	DAU	35,00%
278.	Kab. Dompu	DAU	35,00%
279.	Kab. Lombok Tengah	DAU	35,00%
280.	Kab. Lombok Timur	DAU	35,00%
281.	Kab. Sumbawa Barat	DAU	35,00%
282.	Kab. Lombok Utara	DAU	35,00%
283.	Prov. Nusa Tenggara Timur	DAU	35,00%
284.	Kab. Alor	DAU	35,00%
285.	Kab. Ende	DAU	35,00%
286.	Kab. Flores Timur	DAU	35,00%
287.	Kab. Kupang	DAU	35,00%
288.	Kab. Lembata	DAU	35,00%
289.	Kab. Manggarai	DAU	35,00%
290.	Kab. Ngada	DAU	35,00%
291.	Kab. Sikka	DAU	35,00%
292.	Kab. Sumba Barat	DAU	35,00%
293.	Kab. Timor Tengah Utara	DAU	35,00%
294.	Kota Kupang	DAU	35,00%
295.	Kab. Rote Ndao	DAU	35,00%
296.	Kab. Manggarai Barat	DAU	35,00%
297.	Kab. Sumba Barat Daya	DAU	35,00%
298.	Kab. Sabu Raijua	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
299.	Kab. Malaka	DAU	35,00%
300.	Kab. Kepulauan Tanimbar	DAU	35,00%
301.	Kab. Maluku Tengah	DAU	35,00%
302.	Kab. Maluku Tenggara	DAU	35,00%
303.	Kab. Buru	DAU	35,00%
304.	Kota Ambon	DAU	35,00%
305.	Kab. Seram Bagian Timur	DAU	35,00%
306.	Kab. Kepulauan Aru	DAU	35,00%
307.	Kota Tual	DAU	35,00%
308.	Kab. Maluku Barat Daya	DAU	35,00%
309.	Prov. Papua	DAU	35,00%
310.	Kab. Biak Numfor	DAU	35,00%
311.	Kab. Merauke	DAU	35,00%
312.	Kab. Mimika	DAU	35,00%
313.	Kab. Paniai	DAU	35,00%
314.	Kab. Puncak Jaya	DAU	35,00%
315.	Kab. Kepulauan Yapen	DAU	35,00%
316.	Kab. Sarmi	DAU	35,00%
317.	Kab. Yahukimo	DAU	35,00%
318.	Kab. Pegunungan Bintang	DAU	35,00%
319.	Kab. Tolikara	DAU	35,00%
320.	Kab. Boven Digoel	DAU	35,00%
321.	Kab. Mappi	DAU	35,00%
322.	Kab. Waropen	DAU	35,00%
323.	Kab. Supiori	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
324.	Kab. Mamberamo Raya	DAU	35,00%
325.	Kab. Mamberamo Tengah	DAU	35,00%
326.	Kab. Yalimo	DAU	35,00%
327.	Kab. Lanny Jaya	DAU	35,00%
328.	Kab. Nduga	DAU	35,00%
329.	Kab. Dogiyai	DAU	35,00%
330.	Kab. Puncak	DAU	35,00%
331.	Kab. Intan Jaya	DAU	35,00%
332.	Kab. Deiyai	DAU	35,00%
333.	Kab. Halmahera Tengah	DAU	35,00%
334.	Kab. Halmahera Barat	DAU	35,00%
335.	Kab. Halmahera Timur	DAU	35,00%
336.	Kab. Halmahera Utara	DAU	35,00%
337.	Kab. Kepulauan Sula	DAU	35,00%
338.	Kota Tidore Kepulauan	DAU	35,00%
339.	Kab. Pulau Taliabu	DAU	35,00%
340.	Prov. Banten	DAU	35,00%
341.	Kab. Lebak	DAU	35,00%
342.	Kab. Pandeglang	DAU	35,00%
343.	Kab. Serang	DAU	35,00%
344.	Kota Serang	DAU	35,00%
345.	Kab. Belitung	DAU	35,00%
346.	Kota Pangkal Pinang	DAU	35,00%
347.	Kab. Bangka Tengah	DAU	35,00%
348.	Kab. Bangka Barat	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
349.	Kab. Boalemo	DAU	35,00%
350.	Kab. Gorontalo	DAU	35,00%
351.	Kota Gorontalo	DAU	35,00%
352.	Kab. Pohuwato	DAU	35,00%
353.	Kab. Natuna	DAU	35,00%
354.	Kab. Kepulauan Anambas	DAU	35,00%
355.	Kab. Karimun	DAU	35,00%
356.	Kota Tanjung Pinang	DAU	35,00%
357.	Kab. Lingga	DAU	35,00%
358.	Kab. Bintan	DAU	35,00%
359.	Prov. Papua Barat	DAU	35,00%
360.	Kab. Fak Fak	DAU	35,00%
361.	Kab. Manokwari	DAU	35,00%
362.	Kab. Sorong	DAU	35,00%
363.	Kota Sorong	DAU	35,00%
364.	Kab. Sorong Selatan	DAU	35,00%
365.	Kab. Teluk Bintuni	DAU	35,00%
366.	Kab. Teluk Wondama	DAU	35,00%
367.	Kab. Kaimana	DAU	35,00%
368.	Kab. Maybrat	DAU	35,00%
369.	Kab. Tambrau	DAU	35,00%
370.	Kab. Manokwari Selatan	DAU	35,00%
371.	Kab. Pegunungan Arfak	DAU	35,00%
372.	Kab. Majene	DAU	35,00%
373.	Kab. Mamuju	DAU	35,00%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	DAERAH	JENIS DANA TRANSFER UMUM	PERSENTASE
374.	Kab. Pasangkayu	DAU	35,00%
375.	Kab. Mamuju Tengah	DAU	35,00%
376.	Prov. Kalimantan Utara	DAU	35,00%
377.	Kab. Bulungan	DAU	35,00%
378.	Kab. Malinau	DAU	35,00%
379.	Kab. Nunukan	DAU	35,00%
380.	Kab. Tana Tidung	DAU	35,00%

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerjasama Antar Lembaga



DIAH SARKORINI
NIP. 196301141988032001